

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa pada tahun 2018 pendapatan asli daerah provinsi Jawa Timur tertinggi adalah Kota Batu yaitu Rp. 8,079,142,194,268, sedangkan yang terendah adalah kota Probolinggo yaitu Rp. 833,603,523,833. Pada tahun 2019 pendapatan asli daerah provinsi Jawa Timur tertinggi adalah Kota Batu yaitu Rp. 8,733,224,623,734, sedangkan yang terendah adalah kota Pasuruan yaitu Rp. 909,414,379,627.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, komponen tersebut berasal dari Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-

sumber keungan daerah, oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangandaerah. Sumber-sumber PAD merupakan bagian keungan daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Dilihat dari ekonomi Syariah sesuai dengan sejarah bahwa sumber keungan pada masa Rasulullah SAW pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang rasul (utusan Allah). Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum, politik dan juga masalah perniagaan atau ekonomi.

Dasar hukum dalam kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah diatur baik dalam hukum Islam maupun dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pendapatan asli daerah jika dilihat dari cermin ekonomi Islam pada masa penguasa muslim pajak diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan Negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan Negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a’laahuma” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashlahat yang lebih besar) dan “yatahammalu adl-dlarar al-khaas

li daf'I dlararin aam” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Musthasfa dan asy-Syatibhi dalam al-I'tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-Maal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Sudah diketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain disamping kewajiban zakat. Allahta'ala berfirman, dalam Al-Qur'an Al-Hujurat 49:15:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مُّكْمِرَاتًا بَوَاءًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لَوْ كُنْتُمْ صَادِقُونَ

Artinya: orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar”.⁶⁵

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah di kabupaten dan kota di Jawa Timur pada tahun 2019 semuanya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Namun demikian peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tersebut beragam. Ada yang mengalami peningkatan tajam dan ada pula yang hanya mengalami peningkatan sedikit.

Pendapatan asli daerah tersebut didapatkan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal

⁶⁵ Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008), hal. 190.

157 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu⁶⁶: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

B. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa pada tahun 2018 indeks pembangunan manusia provinsi Jawa Timur tertinggi adalah Kota Surabaya yaitu 81,74%, sedangkan yang terendah adalah kabupaten Sampang yaitu 61%. Pada tahun 2019 indeks pembangunan manusia provinsi Jawa Timur tertinggi adalah Kota Surabaya yaitu 82,22%, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Sampang yaitu 61,94%.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.⁶⁷

⁶⁶ Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 157

⁶⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Pratama. 2015), hlm.86

Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dengan perhitungan fisik dan non-fisik seperti tingkat konsumsi per-kapita, angka kriminalitas, angkatan kerja, tingkat ekonomi, dan akses di mdia masa. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari tiga gabungan dimensi yaitu dimensi umur, manusia terdidik dan standar hidup yang layak. Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kesejahteraan menitikberatkan perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan.⁶⁸

Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana kbutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut terpnuhi sesuai dngan tingkat hidup. Dan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, BPS (badan pusat statistik) memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut: pendapatan, perumahan dan pemukiman, kesehatan dan pendidikan.⁶⁹

Kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini dilihat dari indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah atau negara, yang mengombinasikan pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan. Indikator komposit pembangunan

⁶⁸ Zaenal Tanjung, "Peranan Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Ekonomi masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi Untuk Melengkapi Tugas-tugas Guna Memperoleh Gelar Sarjana IAIN Rden Intan Lampung), 2016. hlm. 42

⁶⁹ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2009), hlm. 96

manusia adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat pencapaian pembangunan manusia antar wilayah dan antar waktu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang dapat menunjukkan persentase pencapaian dalam pembangunan manusia dengan memperhatikan tiga faktor yaitu kelangsungan hidup, pengetahuan dan daya beli.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Jawa Timur pada tahun 2019 semuanya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Namun demikian peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tersebut beragam. Ada yang mengalami peningkatan tajam dan ada pula yang hanya mengalami peningkatan sedikit. Indeks Pembangunan Manusia tertinggi ada di kota Surabaya, sedangkan terendah tahun 2018 adalah Kabupaten Sampang.

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang di alami oleh faktor produksi tidak di anggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti yang memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.

Banyak ahli ekonomi maupun fikih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud

pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spritual manusia.

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, di mana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia.

C. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikan uji F variabel pendapatan asli daerah $> 0,05$, yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga hasil dari pengujian secara simultan ini adalah variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dibutuhkan dana yang dimana dana tersebut bersumber dari penerimaan pemerintah yang

direalisasikan melalui keuangan publik. Karena agar dapat terlaksana kegiatan pembangunan tersebut pemerintah harus mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja dengan baik. Dalam Pandangan Islam untuk mencapai suatu kesejahteraan tugas pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya.

Dalam pemikiran Islam menurut An-Nabahan, Pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya pemerintah memiliki kebijakan fiskal yang digunakan untuk menjalankan tugasnya. Kebijakan Fiskal dalam Islam sudah ada sejak masa Rasulullah Saw. Dan para Khulafaur Rasyidin. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi, ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang.

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya suatu kenyataan sederhana, tetapi sering kali dilupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan

harta dan uang. kalimat ini dengan jelas menekankan pesan utama yaitu pembangunan yang bersifat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat dari pembangunan. berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia. Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia disemua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan.

Kesejahteraan masyarakat atau manusia tersebut dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara khusus mengukur pencapaian pembangunan manusia menggunakan komponen dasar kualitas hidup. IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu Negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan atau tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa, dan rata rata lama sekolah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Jawa Timur. Hal ini dapat saja terjadi karena dengan kemandirian ekonomi manusia atau masyarakat yang sudah mencukupi kebutuhannya baik pendidikan, ekonomi dan lainnya. Adapun pendapatan asli daerah dapat berfungsi sebagai sarana pendukung dalam peningkatan sarana dan prasarana

yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain secara mandiri masyarakat secara mandiri dapat berperan aktif dalam mencapai kesejahteraannya, sedangkan sarana pendukungnya adalah dari pembangunan fasilitas-fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini mendukung penelitian Muhammad Taufiq⁷⁰ tahun 2019 bahwa, (1) efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo didominasi kondisi Sangat Efektif pada tahun 2013-2018 menunjukkan alokasi PAD sudah efektif dan berjalan sangat baik. (2) Efektifitas alokasi Penpadatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan pandangan Ekonomi Islam. Hal tersebut terjadi karena alokasi yang dilakukan sesuai denganfalah dan dikembalikan kepada masyarakat atau umat sehingga sudah sesuai dengan kajian Ekonomi Islam.

⁷⁰ Muhammad Taufiq. *Analisis Efektifitas Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Ditinjau dari Ekonomi Islam*. (Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2019).